

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA

Ratna Eka Puji Astutik
ratnarathu.rr@gmail.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the influence of tax planning and deferred tax expense to the earnings management. The population is all manufacturing companies which engage in the field of food and beverages which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2014 periods. The sample collection technique has been done by using purposive sampling and 10 companies have been selected as samples. The analysis technique has been done by using multiple regressions analysis. The result of the research shows that tax planning and deferred tax expense has an influence to the earnings management on manufacturing companies which engage in the field of food and beverages which indicate that the research models are feasible for the following research. The correlation among models which have applied in this research to the earnings management is firm. The result of partial test of tax planning and deferred tax expense shows that each of them has an influence to the earnings management on manufacturing companies which engage in the field of food and beverages.

Keywords: Tax Planning, Deferred Tax Expense, Earning Management.

INTISARI

Praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan. Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang *food and beverages* di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga jumlah sampel yang didapat sebanyak 10 perusahaan. Adapun Teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang mengindikasikan model penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya. Hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap manajemen laba memiliki hubungan yang erat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan masing-masing mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Manajemen Laba

PENDAHULUAN

Tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan laba yang tinggi, hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen, karena semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai pengelola secara langsung. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu pemilik (*stakeholders*) dan investor dalam mengestimasi *earnings power* (kekuatan laba) untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh. Situasi ini memungkinkan manajer untuk melakukan

perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulistyanto, 2008: 15). Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasa laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) yaitu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan *stakeholders* (Hairu, 2009: 1).

Pihak manajemen memiliki wewenang dan keleluasaan dalam memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pribadi dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak lagi mencerminkan kinerja manajemen yang sesungguhnya, namun telah direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan manajemen. Inilah yang disebut dengan *agency problem* (Sulistyanto, 2008: 132).

Aktifitas manajemen banyak sekali dipraktikkan pada perusahaan besar, dengan tujuan menarik para pelaku pasar untuk berinvestasi dalam perusahaan. Pada dasarnya aktifitas tersebut sangat merugikan bagi perusahaan maupun bagi emiten yang ada dalam perusahaan, karena informasi yang dipublikasikan hanya bersifat semu yang justru akan mempengaruhi eksistensi perusahaan di masa depan. Dengan demikian sedapat mungkin apa yang dilaporkan perusahaan mendekati hal sesungguhnya terjadi, baik untuk laporan pajak maupun laporan kepada investor.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Isu dalam penelitian ini adalah adanya motif perencanaan pajak yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Terungkapnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia membuktikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif dengan cara melakukan pembiayaan fiktif, transaksi ekspor fiktif, dan *transfer pricing* untuk merekayasa omzet penjualan.

Perencanaan pajak terkait dengan pelaporan laba perusahaan. Laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan menggunakan berbagai teknik manajemen laba untuk mencapai target. Perencanaan pajak dan manajemen laba terkait satu sama lain, karena sama-sama bertujuan untuk mencapai target laba dengan merekayasa angka laba dalam laporan keuangan. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggelapkan pajak menunjukkan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan memanipulasi aktivitas operasi perusahaan (*real earnings management*).

Selain perencanaan pajak yang diduga mempengaruhi manajemen laba, beban pajak tanggungan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman dalam Widyaningsih dan Purnamawati (2012) bahwa alasan penghematan atau penundaan pajak (pajak tanggungan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari tiga hipotesis sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu *Political Cost Hypothesis* sehingga beban pajak tanggungan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, menunda pendapatan dan mempercepat biaya untuk menghemat pajak salah satunya dengan merekayasa beban pajak

tanggungan yang berhubungan dengan akrual sehingga memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba.

Dalam PSAK No. 46 (IAI, 2009) menyatakan bahwa nilai pencatatan aktiva pajak tanggungan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Perusahaan harus menurunkan nilai tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi, sebagian maupun semua aktiva pajak tanggungan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Dengan adanya kewajiban untuk selalu melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tanggungan dan cadangan aktiva pajak tanggungan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aktiva pajak tahunan tersebut bersifat subjektif.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di BEI, 2) Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di BEI.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Mangoting, (1999) dalam Sumomba, (2010) mengungkapkan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha WP atau kelompok WP sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan.

Penghematan pajak adalah suatu usaha untuk menghemat hutang pajak dengan cara menahan diri untuk tidak mengkonsumsi barang-barang atau dengan cara mengurangi pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk pemberian kenikamaan (*natura*), karena biaya-biaya yang bersifat sebagai kenikamaan (*natura*) tidak dapat diakui sebagai biaya untuk tujuan fiskal, sehingga biaya-biaya tersebut akan dikoreksi sebagai penambahan pendapatan. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *—the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (Suandy, 2008: 491).

Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri adalah (Mangoting, 1999 dalam Sumomba 2010) antara lain: 1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi, 2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan WP untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, (Suandy, 2008: 489) antara lain: 1) Pergeseran pajak (*shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya, 2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli, 3) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya, 4) *Tax evasion* adalah ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax evasion* (penyelundupan pajak) sebagai usaha memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari

penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terhutang yang sebenarnya, 4) *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. usaha meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang- Undang dan berada dalam jiwa dari Undang-Undang: atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-Undang.

Sedangkan Lumbantoran (1996) dalam Aditama dan Purwaningsih (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu: 1) Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya, 2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli, 3) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya, 4) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya, 4) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008: 483) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Apabila dalam perencanaan pajak telah diketahui jenis dan cara meminimalkan pajak, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen perpajakan tidak bermaksud untuk melanggar peraturan perpajakan. Jika pelaksanaan kewajiban perpajakan menyimpang dari peraturan yang ada, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak (Suandy, 2008: 9).

Lumbantoran (1996) dalam Aditama dan Purwaningsih (2013) menyatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen dapat tercapai, yaitu: 1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan, dengan jalan mempelajari undang-undang perpajakan yang berlaku dan surat keputusan dan edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, agar dapat diketahui adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan, 2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Pengendalian pajak adalah tahap terakhir dari manajemen pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material (Suandy, 2008 : 10). Didalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak, oleh karena itu pengaturan dan pengendalian pembayaran pajak sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Dalam hal ini, pengendalian pajak termasuk juga pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pajak Tanggahan

Pajak tanggahan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax*

losscarry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif.

PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan (Zain, 2007).

Pajak tangguhan ini diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Sumomba (2010) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).

Suandy (2008: 91) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar dari pada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal. Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46 (IAI, 2009).

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (Rosenzweig dan Fischer, 1994 dalam Sulistyanto, 2008). Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Schipper (2000) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Maksud dari intervensi di sini adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (*fashioning accounting reports*), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba (Wild et al., 2004).

Walaupun terdapat beberapa definisi tentang manajemen laba, definisi tersebut memiliki benang merah yang menghubungkan definisi yang satu dengan yang lainnya, yaitu menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi

keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan (Sulistyanto, 2008).

Munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, dilandasi oleh dua teori, yaitu: *pertama*, *Agency Theory* (Teori Keagenan). Jensen dan Meckling dalam Sumomba (2010) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Di dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelolah perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya melalui pembagian deviden atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi.

Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja.

Kedua, *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif). Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sumomba (2010) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*) dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political cost hypothesis*). Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*) yaitu: 1) *The Bonus Plan Hypothesis*. Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang dapat diperoleh perusahaan, 2) *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*. Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelolah perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. 3) *The Political Cost Hypothesis*. Scott (2003) dalam Sumomba (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan

terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba (Scott dalam Sumomba, 2010), yaitu : 1) Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*). Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya, 2) Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*). Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya, 3) Motivasi Politik (*Political Motivation*). Perusahaan besar dan *industry strategic* akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility*-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan, 4) Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*). Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, 5) Pergantian CEO (*Chief Executif Officer*). Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik, 6) *Initial Public Offering* (IPO). Perusahaan yang pertama kali akan *go public* belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan, 7) Pemberian Informasi kepada Investor (*Communicate Information to Investors*). Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pemilihan metode akuntansi dalam rangka melakukan manajemen laba harus dilakukan dengan penuh kecermatan oleh manajer agar tidak diketahui oleh pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu manajer harus memiliki strategi agar manajemen laba yang dilakukan tidak diketahui pihak luar. Strategi yang diambil berhubungan dengan jenis apa yang digunakan dalam melakukan manajemen laba. Scott (2003) dalam Sumomba (2010) mengemukakan bahwa ada empat jenis manajemen laba, yaitu : 1) *Taking a Bath*. Dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen melakukan pembersihan diri dengan membebaskan perkiraan-perkiraan mendatang dan mengakibatkan laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya, 2) *Income Increasing*. Manajemen laba dilakukan manajemen pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan dan sebagainya, 3) *Income Maximization*. *Income Maximization* (maksimalisasi laba) dilakukan supaya kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi kesepakatan kontrak hutang atau kredit dan perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana (IPO), 4) *Income Smoothing*. *Income smoothing* (perataan laba) merupakan bentuk manajemen laba yang paling populer dan sering dilakukan karena lewat

perataan laba manajemen dapat menaikkan dan menurunkan laba. Manajemen melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba sehingga perusahaan terlihat lebih stabil dan tidak beresiko tinggi. Dengan kondisi perusahaan yang terlihat stabil akan menyebabkan investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Pajak dalam Praktik Manajemen Laba

Perencanaan pajak merupakan salah satu insentif pajak yang mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2003) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung misal: melakukan pergeseran pajak, dengan mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya, melakukan kapitalisasi, dengan melakukan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. (Aditama dan Purwaningsih, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2013) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya

praktik manajemen laba. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara perencanaan pajak dengan manajemen laba.

H₁ : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dalam Praktik Manajemen Laba

Keberadaan pajak sebenarnya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara, disisi lain akuntansi merupakan sistem pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan. Hanlon (2005) mengatakan bahwa secara spesifik sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, sebaliknya sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan diharapkan dapat menekan asimetris informasi yang mungkin terjadi antara manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan keuangan sebagai pihak eksternal.

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Metode pajak tangguhan merupakan salah satu metode akuntansi yang berhubungan dengan kebijakan akrual yang ditetapkan oleh manajemen. Perusahaan diwajibkan secara periodik untuk mengevaluasi apakah manfaat atau kewajiban perpajakan yang ditangguhkan memang dapat direalisasi di masa mendatang. Apabila realisasi terhadap aset diragukan, maka harus ada penilaian kembali terhadap aset yang bersangkutan. Pertimbangan bahwa suatu aktiva atau kewajiban pajak tangguhan dapat direalisasikan di masa yang akan datang bersifat sangat subjektif, sehingga dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui kebijakan akrual yang dapat direayasa (Dewi, 2007:47). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman dalam Widyaningsih dan Purnamawati (2012: 323) bahwa alasan penghematan atau penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari tiga hipotesis sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu *Political Cost Hypothesis* sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, menunda pendapatan dan mempercepat biaya untuk menghemat pajak salah satunya dengan mereayasa beban pajak tangguhan yang berhubungan dengan akrual sehingga memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak adalah dengan menggunakan metode akuntansi dalam perhitungan nilai persediaan, depresiasi dan cadangan-cadangan yang diperbolehkan (Scott, 2003: 361)

H₂ : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu penelitian yang dilaksanakan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas terdiri dari perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan serta variabel terikat yaitu manajemen laba.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

- a. Perencanaan Pajak (PP), merupakan langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah (Wild et al., 2004):

$$TRR = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

Keterangan:

TRR_{it} = *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t.

Net Income_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

Pretax Income (EBIT)_{it} = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t.

- b. Beban Pajak Tangguhan (BPT), merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan cara membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva (*total asset*) sebagai berikut :

$$BPT = \frac{\text{Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aktiva}}$$

- c. Manajemen Laba (ML), merupakan kebijakan akuntansi atau tindakan-tindakan yang dipilih oleh manajer untuk mencapai beberapa tujuan khusus dalam pelaporan laba. Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba (Philips et al., 2003), adalah sebagai berikut:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan:

ΔE = Distribusi laba, di mana bila nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai ΔE adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian.

E_{it} = Laba perusahaan i pada tahun t.

E_{it-1} = Laba perusahaan i pada tahun t-1.

MVE_{t-1} = *Market Value of Equity* perusahaan i pada tahun t-1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kapitalisasi sebagai proksi *market value of equity*. Nilai kapitalisasi tersebut diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini dilakukan 'evaluasi ekonometri' terhadap model persamaan regresi agar memenuhi syarat sebagai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE): a). Uji Normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Sifat distribusi normal, bahwa setiap fungsi linear dari variabel-variabel yang didistribusikan secara normal (Ghozali, 2013:67). Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal, b). Uji Multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan menggunakan pedoman deteksi dengan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dimana nilai VIF dari masing-masing variabel bebas di sekitar nilai 1 atau maksimal mencapai 10 (di bawah 10 masih ditoleransi), c). Uji Heteroskedastisitas. Menurut Santoso (2011:210), jika sebaran titik-titik berada diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, d). Uji Autokorelasi. Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Model Penelitian

Model ini digunakan karena penelitian ini mengemukakan variabel bebas lebih dari satu, maka analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun Persamaan Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

$$ML = a + b_1PP + b_2BPT + e_i$$

Keterangan :

ML	=	Manajemen Laba
a	=	Konstanta
$b_1 - b_3$	=	Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas
PP	=	Perencanaan Pajak
BPT	=	Beban Pajak Tangguhan
e_i	=	Standar Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak, merupakan langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak). Tingkat perencanaan pajak perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia selama tahun 2012-2014 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perencanaan Pajak Perusahaan *Food and Beverages*

Kode Perusahaan	Tahun			Mean
	2012	2013	2014	
ADES	108.80%	94.02%	74.73%	92.52%
DLTA	74.23%	75.47%	75.90%	75.20%
ICBP	75.22%	75.33%	74.71%	75.09%
INDF	75.66%	85.40%	82.61%	81.22%
MLBI	74.66%	74.27%	73.71%	74.21%
MYOR	77.56%	74.74%	77.37%	76.56%
ROTI	74.65%	74.96%	74.61%	74.74%
SKLT	68.27%	68.92%	70.00%	69.06%
STTP	80.14%	80.14%	73.59%	77.96%
ULTJ	77.17%	74.45%	75.49%	75.70%

Sumber: data sekunder diolah, 2012-2014

Dari tabel diatas terlihat rata-rata tingkat retensi pajak terendah dimiliki oleh PT Sekar Laut, Tbk sebesar 69,06% sedangkan rata-rata tingkat retensi pajak tertinggi terjadi pada PT Akasha Wira International, Tbk sebesar 92,52%.

Beban Pajak Tangguhan , merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Beban pajak tanggungan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014 masing-masing ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2
Beban Pajak Tangguhan Perusahaan *Food and Beverages*

Kode Perusahaan	Tahun			Mean
	2012	2013	2014	
ADES	1.61%	1.10%	0.64%	1.12%
DLTA	0.14%	0.78%	0.83%	0.58%
ICBP	0.56%	0.37%	0.54%	0.49%
INDF	0.66%	0.65%	0.56%	0.62%
MLBI	-1.40%	1.93%	0.52%	0.35%
MYOR	0.01%	0.00%	0.03%	0.01%
ROTI	1.36%	0.80%	1.42%	1.19%
SKLT	0.30%	0.35%	0.59%	0.41%
STTP	0.01%	0.12%	0.24%	0.12%
ULTJ	0.29%	0.39%	0.72%	0.47%

Sumber: data sekunder diolah, 2012-2014

Dari tabel diatas terlihat rata-rata tingkat beban pajak tanggungan tertinggi dimiliki oleh PT Akasha Wira International, Tbk sebesar 1,11%. Sedangkan rata-rata tingkat beban pajak tanggungan terendah terjadi pada PT Mayora Indah, Tbk sebesar 0,01%.

Manajemen laba merupakan kebijakan akuntansi atau tindakan-tindakan yang dipilih oleh manajer untuk mencapai beberapa tujuan khusus dalam pelaporan laba. Tingkat manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3
Manajemen Laba Perusahaan *Food and Beverages*

Kode Perusahaan	Tahun			Mean
	2012	2013	2014	
ADES	-9.65%	2.45%	2.09%	-1.70%
DLTA	-3.46%	-1.40%	-0.29%	-1.72%
ICBP	-0.71%	0.10%	-0.50%	-0.37%
INDF	0.28%	2.65%	-2.98%	-0.02%
MLBI	0.72%	-4.60%	1.49%	-0.80%
MYOR	-2.79%	-2.50%	2.60%	-0.90%
ROTI	-4.93%	-0.63%	-0.59%	-2.05%
SKLT	-2.05%	-2.80%	-4.05%	-2.97%
STTP	-3.53%	-2.89%	-0.44%	-2.29%
ULTJ	-7.21%	0.74%	0.32%	-2.05%

Sumber: data sekunder diolah, 2012-2014

Dari tabel diatas terlihat rata-rata tingkat manajemen laba terendah dimiliki oleh PT Sekat Laut, Tbk sebesar -2,97% sedangkan rata-rata tingkat manajemen laba tertinggi terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk sebesar -0,02%.

Uji Asumsi Klasik

Dari uji asumsi klasik yang dilakukan dihasilkan: a). Uji Normalitas. Dari grafik uji normalitas dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob.*) Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal, b). Autokorelasi. Dari pengujian terlihat batas-batas distribusi nilai test durbin-Watson dan kurva pengujian auto korelasi Durbin-Watson di atas dapat disimpulkan bahwa nilai test durbin-Watson berada pada daerah nonautokorelasi sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan penelitian tidak terjadi gangguan otokorelasi, c). Multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel tersebut lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian, d). Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian berkaitan dengan perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen pada perusahaan yang bergerak

dalam *food and beverages* Di Bursa Efek Indonesia secara linier. Dari pengujian yang telah dilakukan melalui regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Sig.	r
Perencanaan Pajak	0,220	0,030	0,399
Beban Pajak Tangguhan	2,758	0,031	0,393
Konstanta	4,889		
Sig. F	0,002		
R	0,624		
R ²	0,389		

Sumber: data sekunder diolah, 2012-2014

Dari data tabel di atas persamaan regresi yang didapat adalah:

$$ML = 4,889 + 0,220_{TRR} + 2,758_{BPT}$$

Pembahasan

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2003). Praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah beban pajak tangguhan. Penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak, (Widyaningsih dan Purnamawati, 2012)

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan variabel bebas yang terdiri dari perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Hasil ini mengindikasikan model penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya. Hasil ini menunjukkan bahwa naik turunnya manajemen laba perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia ditentukan oleh seberapa besar nilai perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini diperkuat dengan perolehan koefisien korelasi sebesar 62,4 % menunjukkan hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap manajemen laba memiliki hubungan yang erat.

Pengaruh Perencanaan Pajak dengan Manajemen Laba

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Mangoting dalam Sumomba (2010) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha WP atau kelompok WP sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik PPh maupun pajakpajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan.

Hasil pengujian menunjukkan perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman di Bursa efek Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak manajemen laba yang diterapkan dalam perusahaan juga semakin baik. Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*), (Ulfa, 2013).

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sebaliknya, penggelapan pajak (*tax evasion*) diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Scott (2003) dalam Sumomba (2010) mengungkapkan bahwa ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, salah satunya adalah motivasi pajak. Manajemen termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara menurunkan laba sebelum pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumomba (2010) yang menunjukkan perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dengan Manajemen Laba

Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang menurut PSAK No.46 (IAI, 2009: 8). Hasil pengujian menunjukkan beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri makanan dan minuman di Bursa efek Indonesia. Besarnya pajak tangguhan bersih berpengaruh terhadap pembayaran pajak masa depan yang tercermin pada pajak kini di tahun mendatang. Pembalikan perbedaan temporer akan mempengaruhi pembayaran pajak di masa yang akan datang. Misalnya, pembalikan kewajiban pajak tangguhan akan meningkatkan pembayaran pajak masa yang akan datang, sementara pemulihan aset pajak tangguhan akan mengurangi pembayaran pajak masa depan. Pembayaran pajak yang semakin meningkat atau semakin menurun akan berpengaruh pada laba bersih yang akan dihasilkan. Jika penghasilan sebelum pajak konstan, semakin besar beban pajak yang dibayarkan maka semakin kecil laba bersih yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya.

Hasil ini sejalan dengan pendapat (Waluyo, 2008:216), pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Hasil ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sumomba (2010) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Namun tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dan Purnamawati (2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 1) Hasil pengujian menunjukkan perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman di Bursa efek Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak manajemen laba yang diterapkan dalam perusahaan juga semakin baik, 2) Hasil pengujian kedua menunjukkan beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri makanan dan minuman di Bursa efek Indonesia. Hasil ini mencerminkan setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Perbedaan temporer muncul dari komponen akrual dan arus kas operasi. Karena adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh dalam usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan : 1) Hendaknya Perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak secara lebih baik lagi, melalui penganalisaan informasi yang ada secara teliti, seperti mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, berita pajak, dan majalah atau koran yang berhubungan dengan perpajakan dalam rangka meminimalisir PPh Badan perusahaan melalui perencanaan pajak yang baik, 2) Perusahaan sebaiknya membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, dan memutakhirkan perencanaan pajak supaya sesuai dengan kondisi sekarang, 3) Bagi peneliti berikutnya hendaknya lebih diperbanyak jumlah sampel, periode serta pengamatan untuk lebih diperpanjang, serta memperhitungkan kondisi ekonomi makro, internal non finansial, situasi politik dan kondisi umum regional serta internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F. dan A. Purwaningsih. 2013. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi, U. 2007. Analisis Hubungan Antara Beban Pajak Tangguhan dengan Manajemen Laba. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS*. Edisi Ketujuh. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hairu, N. 2009. Hubungan antara Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Struktur Pengendalian Intern terhadap Perencanaan Audit. *Skripsi*. Universitas Timbul Nusantara-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta.
- Hanlon, M. 2005. The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flow When Firms Have Large Book-tax Differences. *The Accounting Review*. Vol. 80: 137-166.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Phillips, J.M., Pincus dan S. Rego. 2003. Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. *The Accounting Review*. Vol 78: 491 - 521.
- Santoso, S. 2011. *Mastering SPSS*. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Scoot, W. R. 2003. *Financial Accounting Theory 2nd Edition*. Prentice Hall Canada, Inc. Toronto.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Penerbit Salemba Empat. Edisi Keempat. Jakarta.
- Sulistyanto, S 2008. *Manajemen Laba - Teori dan Model Empiris*. Penerbit PT Grasindo. Jakarta .
- Sumomba, C. R. 2010. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Ulfa, Y. 2013. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Widyaningsih, A. dan C.A. Purnamawati. 2012. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Prosiding Seminar Nasional Forum Bisnis & Keuangan*.
- Wild, John J., K. R. Subramanyam, dan Robert F. Hasley. 2005. *Financial Statement Analysis (Analisis Laporan Keuangan)*. Edisi 8, Buku Satu. Diterjemahkan oleh: Yanivi S. Bachtiar, S. Nurwahyu Harahap. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, M. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

•••